



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Profil Perusahaan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah instansi pemerintah Indonesia dalam bidang terkait hukum dan HAM. Kemenkumham berada di dalam tanggung jawab Presiden RI. Menteri Yassona Laoly telah menjabat sebagai Menteri Kemenkumham sejak 27 Oktober 2017. Sebelumnya Kemenkumham mempunyai empat nama yang berbeda, lalu setelah disimpulkan menjadi "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia".

Gambar 2.1. Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sumber: Kemenkumham.go.id, 2021

2.1.1. Sejarah Perusahaan

Awal mula dibentuknya Kemenkumham, berawal pada 19 Agustus 1945 dengan nama "Departemen Kehakiman" oleh Menteri bernama Soepomo. Pada jaman belanda, Kemenkumham disebut Departemen *Van Justitie*, berdasarkan *Herdeland Staatsblad*. Lalu

dalam sidang PPKI 1945 departemen kehakiman ditunjuk untuk mengurus pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya waktu pada jaman itu, Kemenkumham telah ditetapkan mengurus hal hukum dan HAM. Nama Kemenkumham telah berganti-ganti karena menyesuaikan dengan fungsi masing-masing departemen. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di setiap provinsi Indonesia.

2.1.2. Visi Perusahaan

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

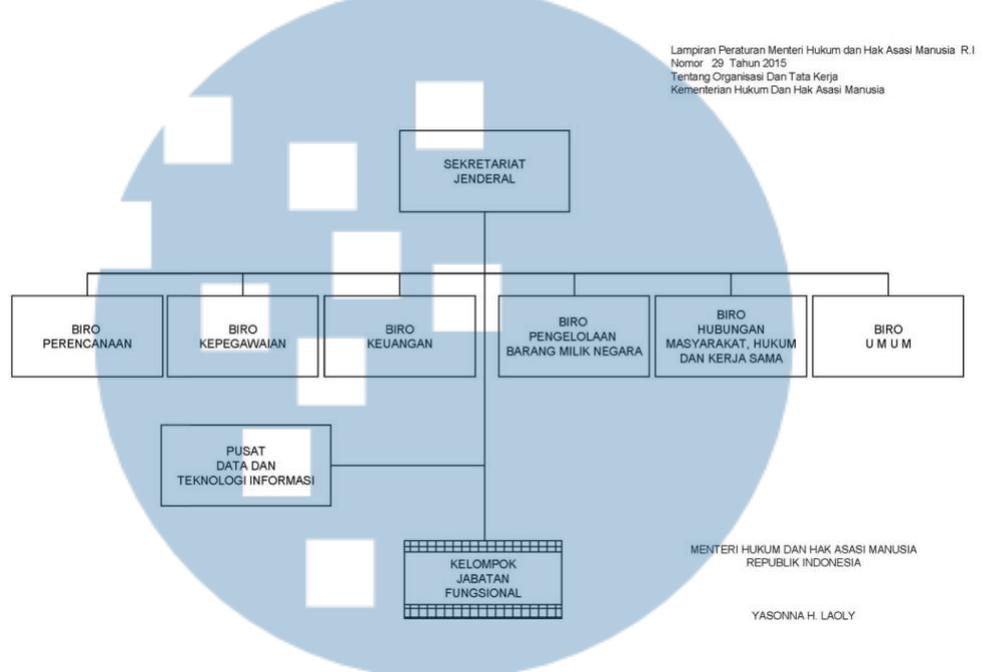
2.1.3. Misi Perusahaan

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.2. Struktur Organisasi Kemenkumham

Gambar 2.12. Struktur Organisasi Kemenkumham

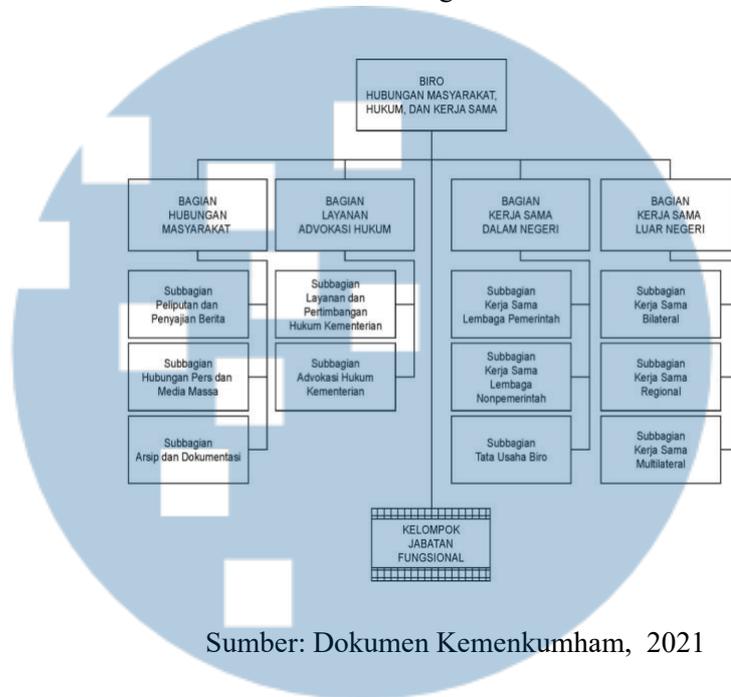


Sumber : Dokumen Kemenkumham, 2021

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.2.1. Ruang Lingkup Kerja Biro Humas

Gambar 2.3. Susunan Struktur Organisasi Biro Humas Kemenkumham



Sumber: Dokumen Kemenkumham, 2021

Sesuai dengan bagan diatas Biro Hubungan Masyarakat (Humas) , Hukum dan Kerja Sama terdiri atas, Bagian Humas, Bagian Layanan Advokasi Hukum, Bagian Kerjasama Dalam Negeri, Bagian Kerjasama Luar Negeri, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lalu Bagian HUMAS terdiri atas, Subbagian Peliputan dan Penyajian Berita, Melakukan peliputan dan penyajian berita. Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa, Melakukan fasilitasi hubungan pers, media massa dan analisa berita. dan Subbagian Arsip dan Dokumentasi, Melakukan layanan informasi, fasilitasi penanganan permohonan informasi, dan pengelolaan dokumentasi, arsip, dan perpustakaan.